

PROSIDING
Diskusi Psikologi Sosial

QUO VADIS
KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA

Disampaikan dalam Forum Diskusi Psikologi Sosial
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata
pada tanggal 18 Juni 2015

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang, 2015

ISBN: 978-602-8011-91-4

**PROSIDING
DISKUSI PSIKOLOGI SOSIAL**

**QUO VADIS KONFLIK SOSIAL
DI INDONESIA**

Editor:
Drs. D.P. Budi Susetyo, M.Si

Penerbit
Universitas Katolik Soegijapranata

Prosiding Diskusi Psikologi Sosial

QUO VADIS KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA

© Universitas Katolik Soegijapranata, 2015

DISUSUN OLEH:

Drs. D.P. Budi Susetyo, M.Si.

EDITOR:

Drs. D.P. Budi Susetyo, M.Si.

Desain Cover :

Y. Supriyadi

ISBN:978-602-8011-91-4

Penerbit :

Universitas Katolik Soegijapranata

Jalan Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Duwur, Semarang 50234

Telepon : +62-24-8441555 (Hunting)

Fax : +62-24-8445625

Email : penerbitan@unika.ac.id

Tahun : 2015

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
Apakah Konflik itu Perlu ?	1
<i>Pius Heru Priyanto - Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata, Semarang</i>	
Konflik Intraagama di Indonesia – Antara Islam Transnasional dan Islam Arus Utama	14
<i>Sulistio – Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang</i>	
Konflik dan Kekerasan dalam Perkawinan dan Keluarga	28
<i>M. Suharsono – Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata, Semarang</i>	
Komunitas Sedulur Sikep dan Pendirian Pabrik Semen	42
<i>Mochamad Widjanarko – Fakultas Psikologi Universitas Muria, Kudus</i>	
Pengalaman Multikultural Warga Etnis Tionghoa di Semarang	54
<i>DP Budi Susetyo dan HM Edy Widiyatmadi – Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata, Semarang</i>	
Menjawab Tantangan Pluralisme di Indonesia.....	70
<i>Tabita Nani Aryani – Magister Sains Psikologi Unika Soegijapranata, Semarang</i>	
Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan: Pencapaian atau Beban ?	84
<i>Th. Indriyani Santosa dan Caroline O. Kame – Magister Sains Psikologi Unika Soegijapranata, Semarang</i>	

KOMUNITAS SEDULUR SIKEP DAN PENDIRIAN PABRIK SEMEN

Mochamad Widjanarko

Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus

Abstrak

Tulisan ini merupakan salah satu pengalaman penulis dalam menelaah permasalahan yang ada di masyarakat, dimana kearifan lokal masyarakat komunitas sedulur sikep berhadapan dengan rencana pendirian pabrik semen. Penulis melakukan pengamatan terlibat, wawancara dan studi dokumentasi serta diskusi yang melibatkan para pihak yang berkepentingan.

Kata kunci: *sedulur sikep, pabrik semen*

Pendahuluan

Studi dari Benda & Castle (1969), King Victor (1973), Korver (1976) dan Shiraishi (1990) mendeskripsikan masyarakat adat Sedulur sikep, sejarahnya serta respon mereka terhadap aturan Negara. Komunitas Sedulur sikep adalah keturunan dari pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan suatu pandangan, ajaran-ajaran, dan tindakan-tindakan melawan Pemerintah Kolonial Belanda dalam bentuk non-kekerasan (Benda & Castle, 1969).

Ajaran penting dari sedulur sikep adalah menolak membayar pajak dan sekaligus menolak segala peraturan pemerintah. Komunitas Sedulur sikep telah lama menutup diri. Pada tahun 1970-an, mereka mulai untuk membuka diri dan bersikap terbuka karena pelan-pelan mulai memahami bahwa Indonesia telah merdeka. Komunitas Sedulur sikep ini tersebar di Jawa Tengah namun konsentrasi terbesar berada di kawasan Blora, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur. Komunitas ini bermukim di perbatasan kedua propinsi tersebut (King Victor, 1973).

Patut diperhatikan bahwa Komunitas Samin menjelaskan identitas diri mereka sebagai *wong sikep* dan *sedulur sikep*. Kata *Samin* menurut komunitas tersebut mengandung pengertian dan definisi negatif.

Masyarakat di luar komunitas ini sering menganggap mereka sebagai orang-orang lugu anti pajak dan peraturan negara sehingga sering kali menjadi bahan lelucon. Istilah *Samin* diambil dari kata *tiyang sami-sami*, sesama manusia dan kata *sikep* berarti target ideal dalam perilaku sosial yang harus dilaksanakan. Target tersebut berorientasi pada perilaku yang lugu dan jujur, serta tidak merugikan orang lain.

Sedulur dalam bahasa Jawa berarti saudara. Mereka memandang semua orang pada hakikatnya sama dan bersaudara. Dengan kata lain, komunitas *Sedulur Sikep* bersikap egaliter di dalam interaksi sosial. Namun hal paling menarik adalah sikap egaliter ini melahirkan hubungan tidak harmonis antara komunitas ini dengan negara (Korver, 1976).

Shiraishi (1990) memberikan deskripsi yang penting yaitu analisis atas kesaksian seorang *Sedulur sikep* pada tahun 1928, yang menjelaskan sejarah dan bentuk perlawanan masyarakat *Sedulur sikep* pada pemerintah Belanda yang membentuk konteks perlawanan yang dilakukan masyarakat *Sedulur sikep* hingga saat ini.

Studi dari Ba'asyin dan Ba'asyin (2014), Samiyono (2010) serta Rosyid (2008) adalah beberapa studi kontemporer tentang masyarakat *Sedulur sikep* di beberapa daerah di Jawa Tengah, masing-masing adalah Blora, Sukolilo dan Kudus. Dari studi ketiganya, dapat diambil pemahaman bahwa tekanan modernisasi dan industrialisasi memang ada, misalnya seperti penggunaan teknologi dalam pertanian dan komunikasi, program pemerintah termasuk pengaruh sosial untuk menempuh pendidikan formal, peluang kerja pada sektor di luar pertanian yang selama menjadi prinsip pekerjaan orang *Sedulur sikep*. Yang menarik adalah dengan lokasi masyarakat *Sedulur sikep* yang tersebar, terdapat pula gradasi respon dari masyarakat *Sedulur sikep* pada modernisasi, yaitu masih adanya *Sedulur sikep* yang kuat memegang teguh ajaran *Sedulur sikep* dan pantangannya, dan di sisi lain ada juga yang mulai melakukan penyesuaian atau adaptasi.

Pengamatan lapangan dan wawancara penulis dimulai tahun 2011-2013 pada sedulur sikep yang ada di Tanduran, Klopoduwur, Blora serta Sukolilo, Pati serta Kudus semakin memberikan gambaran yang jelas mengenai sedulur sikep.

Fakta yang bisa penulis cermati dalam kehidupan sedulur sikep di Blora, di daerah Jasem, Desa Jipangrejo, Tanduran, Klopoduwur, bahkan sampai di Sukolilo, Pati dan Larekrejo, Kudus yang menerapkan perilaku jujur, tidak mau memakan atau mengambil barang yang bukan dari hasil jerih payah sendiri termasuk pangan; makanan dan minuman serta sandang; pakaian, rumah, harta benda, termasuk istri orang lain (baca; selingkuh). Pedoman yang ada, sedulur sikep berpatokan untuk tidak *drengki* (membuat fitnah), *srei* (serakah), *panasten* (mudah tersinggung atau membenci sesama), *dawen* (mendakwa tanpa bukti), *kemeran* (iri hati) *lan nyiyo marang sepodo* (berbuat nista terhadap sesama penghuni alam), *bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur* (mensia-sia kan orang lain, cacat seperti apapun asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara).

“Meskipun sampai sekarang anggapan bahwa orang sedulur sikep tidak bisa diatur atau sebagainya yang negatif itu masih ada, terserah mereka kami tidak peduli”, Mbah Pardji sesepuh sedulur sikep di Desa Jipangrejo (Wawancara, 27 Desember 2011).

Dalam berpakaian sedulur sikep lebih menekankan memakai pakaian dari kain yang berwarna hitam, karena untuk menunjukkan jati dirinya yang rendah hati, bahwa manusia itu kotor, penuh dengan dosa dan tidak ada manusia yang bersih kecuali Nabi Muhammad. Pertanian dijadikan sebagai mata pencaharian secara turun temurun, karena dianggap dapat menjauhkan diri dari perbuatan *geroh* (bahasa Jawa; tidak jujur), berbeda dengan dagang serta tidak mau mencari pangkat seperti pejabat atau yang lain karena beranggapan menjadi petani itu harus apa adanya. Mereka mempunyai bibit sendiri dan membuat pupuk kompos

sendiri. Inilah yang membuat komunitas sedulur sikep bisa berharmonisasi dengan alam.

Manusia sudah sebaik-baiknya makhluk ciptaan Tuhan, tidak menginginkan pangkat atau yang lain untuk menjaga kebersihan diri dari *geroh* tersebut. "Tetapi jika ada orang yang berpangkat itu pilihan mereka, urusan mereka pribadi, dan memang hidup ini harus bervariasi, nanti kalau jadi petani semua yang beli siapa, ada yang pangkat juga tetapi kami tidak ikut campur, yang penting hidup ini rukun satu sama lain tidak ada yang dirugikan" ungkap Mbah Sariman, sesepuh sedulur sikep dari Desa Tanduran, Blora (Wawancara, 27 Desember 2011).

Semua bahan pangan memang hasil tanam sendiri seperti sayur-sayuran, hingga bumbu dapur semua menanam sendiri. "Sebagai petani, semua menanam sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari", tutur Mbah Sariman buyut mantu dari Ki Samin Surosentiko.

"Kami melakukan pertanian organik dan memiliki kalender musim tanam," kata Gunretno menegaskan, tokoh muda sedulur sikep dari Sukolilo, Pati.

Rencana Pabrik Semen

Ketika suatu usaha berskala besar atau 'proyek' dibangun, tentunya terdapat efek yang timbul baik secara positif atau negatif, yang negatif berusaha untuk diminimalisir bahkan ditiadakan. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan menarik adalah untuk siapa usaha ini? untuk mengembangkan modal usaha agar lebih besar? untuk berbagi dengan masyarakat sekitar dengan adanya peluang kerja? atau untuk kepentingan usaha itu sendiri?

Sangat naïf, jika dijawab dengan jawaban normatif, ini usaha yang diperlukan untuk mewujudkan pengembangan ekonomi yang nantinya akan menampung banyak tenaga kerja dan menambah pendapatan asli daerah.

Pertanyaan tersebut menjadi penting, beranalogi dengan pertanyaan sebuah penelitian akan dilaksanakan, untuk apa penelitian ini dilakukan? *aksiologi* atau kemanfaatannya harus jelas. Jika sejak awal 'proyek' sudah tidak jelas, tidak ada transparansi dalam membangun usaha, misalnya jika perlu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), siapa yang terlibat di dalamnya? informasikan secara terbuka ahli-ahli yang terlibat di dalamnya agar para ahli memiliki rasa tanggungjawab moral dalam membuat keputusan, juga siapa birokrat yang terlibat? kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan? transparansi informasi sejak awal akan meminimalisir prasangka yang ada dalam masyarakat bahkan bisa saja kemudian muncul saling mencurigai antar tetangga yang bisa menimbulkan konflik di dalam masyarakat itu sendiri, *divide et impera*.

Jika itu perusahaan swasta yang dimiliki pemerintah, dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (baca; BUMN) kalau tidak ada transparansi maka sama saja dengan menafikkan para pembayar pajak alias rakyatnya sendiri. Jika itu, perusahaan swasta yang dimiliki oleh beberapa orang, hendaknya juga berfikir panjang dan 'sehat', jika 'proyek' didirikan dalam jangka waktu 10 - 30 tahun akan mengeruk keuntungan akan tetapi 'kehancuran' ekosistem di tempat usaha berdiri akan lebih lama lagi bukan hitungan 10 - 30 tahun tetapi ke anak cucu, lebih dari 50 tahun (Widjanarko, 2013).

Aksi penolakan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati terus berlanjut. Menjelang sidang pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pabrik semen pada Rabu (3/9-2014) di Pati, Aliansi Secepuh, Masyarakat Peduli Gunung Kendeng Kabupaten Pati menolak pembangunan pabrik yang hendak dibangun PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) selaku anak perusahaan PT Indocement Tunggul Prakarsa. Sebanyak 1.000 massa yang menolak pabrik semen akan mengawal supaya institusi terkait tak meloloskan permohonan dokumen AMDAL dari PT SMS. Koordinator Aliansi Sesepeuh Masyarakat Peduli Gunung Kendeng, Manio menyatakan, massa yang mengawal sidang

tersebut akan bergerak dari kantor PT SMS menuju Hotel Pati, tempat berlangsungnya pembahasan dokumen analisa tersebut (Suara Merdeka, 1 September 2014).

PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk adalah salah satu produsen semen terbesar kedua di Indonesia. Selain memproduksi semen, Indocement juga memproduksi beton siap-pakai, serta mengelola tambang agregat dan tras. Indocement memiliki 12 buah pabrik, sembilan diantaranya berada di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua berada di Cirebon, Jawa Barat dan satu di Tarjun, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Indocement pertama kali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 5 Desember 1989. Sejak tahun 2001, HeidelbergCement Group, yang berbasis di Jerman dan merupakan produsen utama di dunia dengan pabrik di lebih dari 50 negara mengambilalih kepemilikan mayoritas saham di Indocement. Semen yang dipasarkan adalah semen dengan merek "Tiga Roda" (diunduh dari Google Wikipedia Indonesia, 27 November 2014).

"Pembangunan yang harus memperbesar resiko bencana", mungkin istilah yang tepat untuk menggambarkan bagaimana konsep pembangunan saat ini hanya berorientasi pada akumulasi kapital dan jaminan keamanan modal. Kasus rencana pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng Utara menunjukkan bagaimana kuatnya keinginan investor tambang untuk sesegera mungkin mengamankan wilayah potensi tambang untuk cadangan kebutuhan produksi (JM-PPK, 2014).

Rencana besar pembangunan yang dikerangkai dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menjadi rantai panjang lahirnya industri pertambangan baru di Jawa, pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia. Potensi krisis ekologis dalam konsep pembangunan, tak mampu dibendung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh Negara seperti UU Rencana Tata Ruang dan UU Lingkungan Hidup. Dengan dalil menaikkan Pendapatan Asli Daerah dan pemerataan pembangunan, wilayah-wilayah yang sebelumnya diperuntukkan sebagai

kawasan konsevasi dan pertanian, diubah oleh pemerintah daerah menjadi kawasan pertambangan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati menunjukkan bagaimana perubahan ini dijalankan tanpa melalui mekanisme dialog dan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ide kemajuan yang dapat dicapai dalam waktu singkat dengan mendirikan sebanyak mungkin proyek mercu suar industri ekstratif menjadi pola yang umum dikembangkan oleh banyak pemerintah daerah.

Tercatat 8 (delapan) pabrik semen yang merencanakan mendirikan pabrik di wilayah Jawa Tengah, hal yang ironis bagi daerah yang dikenal sebagai lumbung pangan Nusantara. Harapan akan sebuah tatanan pembangunan yang lebih manusiawi datang seiring lahirnya sikap kritis warga yang akan menjadi korban proyek pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara.

Sejak dibentuk pada tahun 2008 di Pati, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) yang diketuai oleh Gunretno, terus melakukan rangkaian kegiatan untuk menolak kehadiran pabrik semen di wilayahnya. Tak terhitung aksi masa dan audiensi yang dijalankan untuk mendesak pejabat publik untuk berpihak kepada kepentingan alam dan petani. Juga berbagai jalur media yang digunakan untuk menyuarakan bahwa kelestarian alam akan lebih menguntungkan untuk pembangunan jangka panjang sebuah daerah. Namun, lagi-lagi usaha ini dimentahkan oleh kepentingan jangka pendek elite politik. Mengetahui bahwa ide pembangunan yang dijalankan selama ini adalah pembangunan yang hanya mengejar akumulasi modal tanpa memperhatikan keselamatan alam dalam jangka panjang.

JM-PPK bersama akademisi dan pegiat lingkungan membentuk forum tata ruang yang akan merumuskan *blue print* pembangunan alternatif kawasan Kendeng Utara. Dalam beberapa pertemuan yang berlangsung pada tahun 2012, forum ini telah merintis *roadmap* untuk memberikan sebuah tawaran kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah

tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam harus dijalankan tanpa harus mengorbankan kepentingan alam. Sudah saatnya keterpinggiran kaum tani sebagai bagian penting dari berdirinya republik ini harus diakhiri. Menuju sebuah tatanan pembangunan yang lebih berorientasi pada rasa keadilan, melestarikan alam dan kemanusiaan. Model-model pembangunan yang mengedepankan industri yang memakan korban kelestarian alam harus dihindari dengan mengedepankan konsep pembangunan yang lebih berperspektif lingkungan (JM-PPK, 2014).

Penulis yang terlibat dalam organisasi non pemerintah, MRC (Muria Research Center) Indonesia mengadakan Diskusi Publik "AMDAL Pabrik Semen Di Pati Kepentingan Siapa?" pada Selasa, 25 November 2014 di Café Koran Muria Lantai 2. Ada 4 narasumber yang hadir di acara tersebut, yakni Husaini (Manajer Yayasan SHEEP Indonesia area Jateng), Franciscus Welirang (Perwakilan PT. Sahabat Mulia Sejati/PT. SMS; Wakil Presiden Direktur PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk), Hendi Hendro Hadi Sudjono (Tim Penilai AMDAL) dan Bambang Sutikno (Perwakilan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng/JM-PPK Pati).

Diskusi ini tidak membahas permasalahan pro dan kontra yang mewarnai masyarakat sekitar pegunungan Kendeng. Namun lebih kepada pembahasan AMDAL oleh tim penilai yang terdiri dari perwakilan universitas di Jawa Tengah. Sejauh mana analisis ini dilaksanakan semenjak PT. SMS berniat mendirikan pabrik semen. Oleh karenanya, setiap narasumber memaparkan pemikiran masing-masing dalam waktu 10 sampai 15 menit.

Franciscus Welirang sebagai perwakilan dari perusahaan PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk mengutarakan salah satu latar belakang didirikannya pabrik semen adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng. Sementara perwakilan warga yang tergabung dalam JM-PPK, Bambang Sutikno,

melihat AMDAL ini hanyalah milik pemrakarsa. Alasannya AMDAL dilaksanakan sebagai satu syarat dalam mendirikan pabrik.

Pada sesi tanggapan, 3 orang peserta diskusi menyampaikan pernyataan. Salah satunya adalah Herry Prayitno, seorang pegawai BLH Pati yang juga menjabat sebagai Ketua Sekretariat AMDAL Pati. Beliau memaparkan masalah yang dipersoalkan warga terkait dengan ketersediaan sumber air serta wilayah KBAK (Kebijakan Bentang Alam Khas).

“Permasalahan air dijawab PT. SMS dengan berwacana akan menyedot air Sungai Juwana untuk dibuat embung. Embung inilah yang akan digunakan sebagai keperluan pabrik dan masyarakat di saat musim kemarau,” ujarnya.

Akhir diskusi ditutup dengan beberapa kesimpulan dari semua narasumber. Salah satunya, Husaini sebagai manajer Yayasan SHEEP mengharapkan proses AMDAL tidak didominasi suasana politik. “Semoga proses pembuatan AMDAL dipenuhi dengan kajian sosial dan suasana alam. Karena kontra yang timbul di masyarakat adalah bentuk dari munculnya suasana politik berupa kepentingan dari pemilik perusahaan,” jelasnya (www.mrcindonesia.com, 2014).

Penutup

Pendirian pabrik semen di lokasi komunitas sedulur sikep dilematis memang. Menurut Hardin (1960, dalam Gardner & Stern, 1996) kelemahan terbesar dari *tragedy of the common* adalah keinginan manusia untuk menguntungkan diri sendiri secara individual, yang dikombinasikan dengan sumberdaya yang bebas tapi tersedia terbatas dan akses yang bebas, berpotensi menghalangi konservasi sumberdaya dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Di dalamnya termasuk dalam mendirikan ‘proyek’ berskala besar tetapi tidak mendapat dukungan masyarakat sekitarnya.

Kebutuhan-kebutuhan manusia dalam konsep humanistik akan rasa aman dari kerusakan lingkungan akibat pendirian pabrik semen dan kosekuensi logis lainnya seperti hilangnya sumber air, berubahnya lapangan pekerjaan yang dilakukan secara turun temurun sebagai petani, hilangnya tanah yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan, dan memudarnya rasa tentram akibat mengalami gangguan psikologis (*stres*) berkepanjangan karena dekat dengan lokasi pabrik semen serta tidak terdapatnya rasa dihargai, diajak untuk membicarakan, berdiskusi, *srawungan* akan rencana pembangunan pabrik semen merupakan kaitan dalam kesehatan psikologis individu untuk dihargai sebagai manusia.

Prediksi teori lapangan (*field theory*) dengan adanya konflik mendekat-menjauh (*approach-avoidance conflict*) yang dikemukakan oleh Kurt Lewin bisa dan akan terjadi, pihak investor pabrik semen yang akan semakin dijauhkan oleh masyarakat sekitarnya akibat kebijakan untuk membangun pabrik semen dengan tidak "memanusiakan" masyarakat sekitar dan dapat diduga rakyat akan lebih mendekat, memihak pada 'kekuatan' dan 'kekuasaan' yang populis dalam hal ini, pihak yang menolak pendirian pabrik semen.

Jelaslah, bisa ditarik benang merah bahwa sebenarnya dalam proses sekarang ini, yang terpenting adalah bagaimana forum dialog sikap pro-kontra pembangunan pabrik semen dapat dilakukan pada batas-batas penilaian yang obyektif dan rasional. Kontroversi pendirian pabrik semen tidak dapat hanya sekedar dianalisis secara ilmiah dan teknis dengan instrumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), melainkan juga perlu dianalisis secara eko-sosio-kultural dan psikologis. itu merupakan kata kunci untuk dapat memperoleh kepercayaan rakyat (Widjanarko, 2014).

Termasuk adanya rasa 'nrimo', berbesar hati buat investor pabrik semen jika masyarakat menolak rencana pendirian pabrik semen. Bukan malahan 'ngotot' dengan mengatas namakan demi 'kepentingan umum'.

DAFTAR PUSTAKA

- Ba'asyin, A. S dan Muhammad, A. B. (2014). *Samin Mistisisme Petani Di Tengah Pergolakan*. Semarang : Penerbit Gigih Pustaka Mandiri
- Benda, H; Lance Castles (1969). "The Samin Movement". *Bijdragen tot de Taal-,Land- en Volkenkunde*: 207–216, 218–240
- Hardin, G. (1968). *The Tragedy of The Commons*. *Science*. 162. (3859):1243-1248
- JM-PPK. (2014). Rembug Kendeng Untuk Indonesia: Menjaga Kedaulatan Lumbung Pangan, *Term Of Reference*: 29 September 2014
- King, V. T. (1973). "Some Observations on the Samin Movement of North -Central Java: Suggestions for the Theoretical Analysis of the Dynamics of Rural Unrest". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*: 457–481.
- Korver, A.; Pieter E. (1976). "The Samin Movement and Millenarism". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*: 249–266.
- Samiyono, D. (2010). *Sedulur Sikep Struktur Sosial dan Agama Masyarakat Samin Di Sukalila*, Salatiga : Program Paska Sarjana Sosiologi Agama Universitas Kristen Satya Wacana
- Shiraishi, T. (1990). "Dangir's Testimony : Saminism Reconsidered" dalam *Indonesia* No. 50 25th Anniversary Edition (Oct 1990) pp. 95-120 diunduh dari <http://www.jstor.org/stable/3351232> diakses tanggal 22 Mei 2014
- Rosyid, M. (2008). *Samin Kudus*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Widjanarko, M. (2012). *Psikologi Lingkungan: Teori dan Praktek*. Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus
- Widjanarko, M. (2013). *Pabrik Semen Untuk Siapa?* .Kudus: Koran Muria 26 September
- www.mrcindonesia.com. (2014). *Laporan Diskusi Publik "AMDAL Pabrik Semen Di Pati Kepentingan Siapa?"*. 25 November 2014.

www.google.com. Wikipedia Indonesia. *Indocement Tunggal Prakarsa* ,
diunduh 27 November 2014

www.suaramerdeka.com. *Masyarakat Gunung Kendeng Tolak Pabrik
Semen* 1 September 2014